

## **PENINGKATAN KUALITAS PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI HUTAN DALAM PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

### ***(Empowerment Quality Improvement of Forest Farmer Groups in Non-Timber Forest Products Management)***

Hendro Asmoro<sup>1</sup>, Sumardjo<sup>2</sup>, Djoko Susanto<sup>2</sup>, & Prabowo Tjitropranoto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia;  
e-mail: asmoro.hendro@gmail.com

<sup>2</sup>Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Jl. Kamper, Kampus IPB Darmaga, Bogor, Indonesia;  
e-mail: sumardjo252@gmail.com; joko.gizi@gmail.com; prabowo26t@gmail.com

Diterima 4 Desember 2017, direvisi 31 Maret 2021, disetujui 31 Maret 2021

### **ABSTRACT**

*Non-timber forest products (NTFPs) management by the forest farmers group (FFG) is not optimal. This condition is thought to be related to the low quality of empowerment of FFG. This can be influenced by the effectiveness of group leadership, extension support, and support for external environmental factors as well as group internal environmental factors. The purposes of the study were: 1) to analyze the factors that influence the quality of FFG empowerment in the management of NTFPs and 2) to formulate model for improving the quality of FFG empowerment in the management of NTFP. The study was conducted in Desember 2016 - April 2017 in East Lampung District, Lampung Province and Sleman District, DI Yogyakarta Province. Respondents were 248 members of FFG who manage NTFPs based on census. The data were analyzed by using descriptive technique and Structural Equations Model. Result of the study showed that the factors that influence the quality of empowerment are extension support as well as FFG internal environment support. Efforts to improve the quality of empowerment can be carried out with: 1) a model of enhancement of extension support that empowers FFG towards filtering power, competitiveness, and partnership power and 2) a model of increasing support for conducive internal environmental factors.*

*Keywords: Empowerment, forest farmer group, non-timber forest products.*

### **ABSTRAK**

Pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh kelompok tani hutan (KTH) kurang optimal sehingga produktivitas rendah dan pemasaran lemah padahal peluang dan potensi HHBK yang dapat dikelola sangat tinggi. Penelitian ini menganalisis kemandirian KTH dalam pengelolaan HHBK. Pengelolaan yang kurang optimal diduga berkaitan dengan rendahnya tingkat kemandirian KTH. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kualitas pemberdayaan, karakteristik anggota kelompok, keefektifan kepemimpinan kelompok, dukungan penyuluhan, dan dukungan faktor lingkungan eksternal serta faktor lingkungan internal kelompok. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK dan merumuskan model peningkatan kualitas pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2016-April 2017 di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta. Responden adalah 248 orang anggota KTH pengelolaan HHBK yang diambil secara sensus. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan inferensial dengan *Structural Equation Model (SEM)* program LISREL 8.80. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pemberdayaan adalah dukungan penyuluhan dan dukungan lingkungan internal KTH. Upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan dapat dilakukan melalui: (1) Model peningkatan dukungan penyuluhan yang memberdayakan KTH menuju daya saring, daya saing, dan daya sanding dan (2) Model peningkatan dukungan faktor lingkungan internal yang kondusif.

Kata kunci: Pemberdayaan, kelompok tani hutan, hasil hutan bukan kayu.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kelompok tani hutan (KTH) kurang berdaya memanfaatkan besarnya potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK). Kondisi ini terlihat dari rendahnya produktivitas dan lemahnya pemasaran. KTH membutuhkan upaya pemberdayaan melalui penyuluhan untuk dapat lebih optimal dalam mengelola HHBK, meningkatkan peran kepemimpinan kelompok dan kemandirian masyarakat. Kemandirian petani hasil penyuluhan ditandai dengan tingginya daya saing, daya saring, dan daya sanding atau kemampuan bermitra dalam pengelolaan usaha kelompok (Sumardjo, 2017).

Pengelolaan potensi komoditas hasil hutan ini di daerah memiliki peluang dan berpotensi cukup besar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan apabila dapat mengatasi beberapa kendala (Salaka, Nugroho, & Nurrochmat, 2012). Kendala pengelolaan komoditas ini, antara lain: (1) belum tersedianya data dan informasi penyebaran dan jenis komoditas sehingga pola pengembangan belum terfokus pada komoditas tertentu dan upaya pengembangannya belum dilakukan secara intensif, (2) pengelolaan dilakukan dalam skala kecil, (3) keterbatasan modal dalam pengembangan, dan (4) pemasaran hasil produksi yang belum memberikan keuntungan proposional bagi pengelola.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, terdapat ± 557 jenis komoditas HHBK yang terbagi dalam kelompok nabati dan kelompok hewani. Kebijakan pengembangannya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan. Puspitojati (2011) dan Hardjanto *et al.* (2013) mengemukakan bahwa HHBK memiliki fungsi strategis dan

memberikan kontribusi tinggi dibandingkan kayu terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat setempat. Penelitian tentang kemandirian kelompok menjadi penting untuk memberikan masukan dan mendukung tercapainya peningkatan kelas kemampuan KTH dari pemula ke madya sebanyak 5.000 unit sebagai indikator kinerja kegiatan Pusat Penyuluhan, Badan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

### B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menjawab masalah:

1. Bagaimana kualitas pemberdayaan (KTH) dan faktor-faktor apa yang dominan mempengaruhinya dalam pengelolaan HHBK.
2. Bagaimana strategi peningkatan kualitas pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dari Desember 2016 sampai dengan April 2017 di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dan Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta. Pemilihan lokasi ditetapkan dengan merujuk pada keberadaan dan perkembangan KTH pengelolaan komoditas HHBK, Permenhut No. P.21/Menhut-II/2009, dan terdapat keragaman KTH dan keserupaan dalam potensi HHBK. Pemilihan kelompok tani *sampling* di tingkat desa terpilih menggunakan *Cluster Random Sampling* berdasarkan tingkat keaktifan kelompok dengan indikator frekuensi pertemuan/musyawarah kelompok dan tingkat partisipasi aktif dan kehadiran anggota dalam setiap kegiatan atau pertemuan kelompok (Raya, 2014; Prawiranegara, Sumardjo, Sri, & Harijati, 2015).

## B. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan metode survei, dilengkapi informasi data kualitatif untuk menjelaskan dan mempertajam hasil penelitian (Moleong, 2011). Data kualitatif diperoleh melalui observasi wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan terpilih secara teknik *snowball* yaitu tokoh formal dan informal yang dianggap memahami kiprah KTH dan potensi HHBK.

Data primer meliputi karakteristik anggota kelompok tani dan persepsinya terhadap dukungan penyuluhan, faktor lingkungan eksternal pendukung usaha HHBK, kualitas pemberdayaan KTH, faktor internal KTH, dan kemandirian KTH. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner.

Data sekunder meliputi demografi wilayah, KTH dan kegiatannya, serta pengelolaan jenis komoditas HHBK. Jenis komoditas HHBK yang dikelola oleh KTH di Kabupaten Lampung Timur adalah lebah madu sedangkan di Kabupaten Sleman adalah bambu. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui analisis data dan laporan kegiatan KTH dari instansi penyelenggara penyuluhan.

Pengumpulan data dilakukan terhadap petani yang tergabung dalam kelompok pengelola komoditas HHBK terpilih sebagai responden penelitian. Jumlah responden sebanyak 248 orang petani, terdiri dari 79 orang di Kabupaten Lampung Timur dan 169 orang di Kabupaten Sleman.

## C. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif menggunakan bantuan program SPSS 20 *for windows* dan analisis *inferensial* menggunakan SEM dengan *software LISREL 8.80*. Menurut Latan (2013), analisis SEM mengukur peubah yang tidak dapat diukur secara langsung, melainkan melalui indikator-indikatornya. Secara spesifik manfaat SEM adalah: (1) membangun model

penelitian dengan banyak variabel, (2) dapat meneliti variabel atau konstruk yang tidak teramati atau tidak dapat diukur secara langsung (*unobserved variabel*), (3) menguji kesalahan pengukuran (*measurement error*) untuk variabel atau konstruk yang tidak teramati, dan mengkonfirmasi teori sesuai dengan data penelitian (*confirmatory factor analysis*).

## D. Definisi Operasional

Kualitas pemberdayaan KTH adalah tingkat partisipasi aktif kelompok dan keefektifan aspek-aspek penguatan kemampuan kelompok dalam pengelolaan HHBK sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kehidupan yang lebih baik. Tingkat partisipasi aktif didefinisikan sebagai kuantitas dan kualitas keterlibatan kelompok pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pemberdayaan dalam pengelolaan HHBK. Tingkat partisipasi diukur berdasarkan persepsi responden terhadap frekuensi keterlibatan, kesesuaian dengan kebutuhan kelompok, dan manfaat keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan. Keefektifan meliputi aspek-aspek pemberdayaan/penguatan kemampuan kelompok yaitu metode, materi, sarana, prasarana, dan pembiayaan. Keefektifan diukur dari persepsi responden terhadap tingkat ketertarikan, kesediaan, kesesuaian, dan kemudahan mengakses serta manfaat dari aspek-aspek pemberdayaan/penguatan kemampuan kelompok.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK secara deskriptif menunjukkan bahwa kualitas pemberdayaan terhadap KTH dalam pengelolaan HHBK tergolong sedang dan cenderung rendah yaitu berada pada skor rata-rata 31,6–54,6 (Tabel 1).

Tabel 1 Tingkat kualitas pemberdayaan kelompok tani hutan dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu  
*Table 1 Level of empowerment quality of forest farmer groups in non timber forest products management*

Sub peubah ( <i>Sub variable</i> )	Kelompok tani hutan ( <i>Forest farmer group</i> )			Kategori ( <i>Category</i> )
	Lampung Timur ( <i>East Lampung</i> )	Sleman ( <i>Sleman</i> )	Jumlah ( <i>Amount</i> )	
Tingkat partisipasi	55,4	54,2	54,6	Sedang
Keefektifan metode pemberdayaan	30,8	55,4	47,6	Rendah
Keefektifan materi pemberdayaan	51,0	56,7	51,3	Sedang
Keefektifan sarana pemberdayaan	40,8	54,0	49,8	Rendah
Keefektifan prasarana pemberdayaan	32,3	50,4	44,7	Rendah
Keefektifan pembiayaan pemberdayaan	30,7	32,0	31,6	Rendah
Rataan	45,9	55,3	53,1	Sedang

Sumber (*Sources*): Analisis data primer (*Primary data analysis*)

Keterangan (*Remarks*):

N = 248 (Lampung Timur = 79 responden, Sleman = 169 responden);

Kategori interval: 0-50 (rendah), 50,01-75 (sedang), 75,01-100 (tinggi).

Berdasarkan pengamatan, kinerja pemberdayaan tergolong lemah. Hal ini sejalan dengan hasil analisis pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa hampir semua rata-rata skor indikator yang diamati dari aspek kualitas pemberdayaan tergolong rendah yaitu indikator keefektifan pembiayaan pemberdayaan (31,6), keefektifan prasarana pemberdayaan (44,7), keefektifan metode pemberdayaan (47,6), dan keefektifan sarana pemberdayaan (49,8). Indikator tingkat partisipasi dan keefektifan materi pemberdayaan tergolong sedang namun cenderung rendah dengan rata-rata skor 54,6 dan 51,3. Rendahnya keefektifan metode, sarana, prasarana, dan pembiayaan pemberdayaan mengindikasikan lemahnya dukungan dan penerapan unsur-unsur sistem penyuluhan terhadap pengelolaan HHBK bagi KTH. Hal ini menyebabkan lemahnya keberdayaan petani dan upaya pemberdayaan tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sehingga kurang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa metode pemberdayaan dilakukan masih terbatas dalam bentuk kegiatan anjangsana yang intensitasnya terbatas. Bentuk-bentuk metode pemberdayaan lainnya seperti studi banding, widyarkarya, magang, dan sekolah lapang belum diterapkan oleh penyuluh.

Hasil pengamatan di sekretariat KTH juga terlihat bahwa sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemberdayaan yang dimiliki oleh KTH masih sangat minim. Demikian juga halnya yang dimiliki oleh instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan sebagai lembaga yang menaungi penyuluh kehutanan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan dalam kegiatan pemberdayaan KTH masih sangat rendah. Ketiadaan pembiayaan pemberdayaan turut menyebabkan rendahnya kualitas pemberdayaan di kedua lokasi penelitian. Pemberdayaan kurang mencerminkan implementasi fungsi-fungsi penyuluhan. Hal ini sejalan dengan Soebiyanto (1998) yang menyatakan bahwa pemberdayaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan filosofi penyuluhan dalam implementasi sistem penyuluhan tersebut kurang efektif menghasilkan kemandirian.

Pemberdayaan KTH di kedua lokasi penelitian yang kurang menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan sejalan dengan Yumi, Gani, & Sugihen (2011) yang menyatakan bahwa program-program penyuluhan kehutanan masih lebih banyak bersifat pemberian bantuan fisik, bukan meningkatkan kualitas keberdayaan petani dan KTH sehingga tidak memberdayakan. Penyuluhan belum didasarkan pada acuan

yang jelas tentang bagaimana seharusnya pendekatan pembelajaran masyarakat yang baik, terutama pada petani hutan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Sidu (2010) dan Utama (2010) mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat keberdayaan masyarakat sekitar hutan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dipengaruhi secara nyata oleh rendah dan kurang tepatnya proses pemberdayaan.

Fakta ini menunjukkan bahwa metode, sarana, prasarana, dan pembiayaan belum sesuai dengan kebutuhan KTH dan kurang memberikan manfaat yang berarti bagi kelompok maupun anggota kelompok sehingga partisipasi anggota kelompok dalam pengelolaan HHBK juga cenderung rendah. Akibatnya, upaya pemberdayaan yang dilakukan belum memberdayakan KTH.

Rendahnya tingkat partisipasi dalam pemberdayaan KTH mendukung hasil studi Sidu (2010), Suprayitno, Sumardjo, Gani, D.S., & Sugihen (2011), dan Ristinasari, Muljono, & Gani (2013) bahwa partisipasi petani maupun masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi kegiatan adalah rendah. Peningkatan partisipasi anggota kelompok membutuhkan upaya peningkatan keefektifan metode, materi, sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok, kemudahan mengakses dan menerapkannya serta memberikan manfaat bagi pengembangan kelompok secara umum dan khususnya pengelolaan HHBK.

#### **A. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Pemberdayaan KTH dalam Pengelolaan HHBK**

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pemberdayaan dan kemandirian kelompok berdasarkan hasil analisis SEM program LISREL 8.80 (Gambar 1) menunjukkan bahwa kualitas pemberdayaan KTH dipengaruhi secara langsung oleh dukungan

penyuluhan (0,62) dan lingkungan internal kelompok (0,28). Dukungan penyuluhan adalah tingkat keefektifan penerapan sistem penyuluhan dalam mengelola dan mengembangkan usaha komoditas HHBK. Faktor internal KTH adalah aspek-aspek kekuatan dan potensi yang dimiliki kelompok (keberfungsian, kemampuan, dan kedinamisan kelompok) yang memengaruhi dan mendorong aktivitas kelompok dalam mencapai tujuan.

Model persamaan antara kualitas pemberdayaan KTH dengan peubah yang memengaruhinya adalah  $Y_1 = 0,62 * X_3 + 0,28 * X_5$ ,  $R^2 = 0,46$ . Persamaan ini menunjukkan bahwa kontribusi kedua peubah yaitu dukungan penyuluhan dan faktor internal kelompok terhadap kualitas pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK sebesar 0,46 (46%), sedangkan 54% dipengaruhi oleh peubah lain yaitu karakteristik anggota KTH, keefektifan kepemimpinan KTH, dan lingkungan eksternal KTH. Peubah lain bukannya tidak diteliti, namun tersisih dari analisis Model SEM.

Faktor yang menyebabkan lemahnya kualitas pemberdayaan adalah rendahnya dukungan penyuluhan, dominasi pihak eksternal dalam pendekatan pemberdayaan, dan faktor internal KTH. Rendahnya dukungan penyuluhan terindikasi dari lemahnya aspek kompetensi penyuluh, ketidaksesuaian metode dan materi penyuluhan dengan kebutuhan dan kondisi petani. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah dominasi lembaga teknis, akses lembaga penelitian, dan akses teknologi tepat guna di lokasi KTH. Faktor internal KTH yang memengaruhi kualitas pemberdayaan antara lain adalah tingkat keberfungsian KTH, tingkat kedinamisan KTH, dan tingkat kemampuan KTH.

Faktor yang berpengaruh paling kuat terhadap lemahnya kualitas pemberdayaan kelompok adalah dukungan penyuluhan yang dicerminkan oleh indikator: 1)

rendahnya kompetensi penyuluh kehutanan, 2) lemahnya dukungan metode penyuluhan, 3) lemahnya dukungan kelembagaan penyuluhan, 4) rendahnya dukungan materi penyuluhan, dan 5) rendahnya dukungan prasarana penyuluhan.

Cenderung rendahnya dukungan penyuluhan terhadap KTH menunjukkan bahwa penyuluhan kehutanan di lokasi penelitian kurang efektif. Zulvera, Sumardjo, & Slamet M. (2014) menunjukkan bahwa dukungan penyuluhan pertanian yang tergolong sedang dari indikator rendahnya ketepatan metode penyuluhan, kesesuaian materi, model komunikasi, dan kompetensi penyuluh menggambarkan bahwa penyuluhan terhadap petani sayuran organik di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tidak berjalan efektif.

Frekuensi dan interaksi lembaga penyuluhan dan penyuluh kehutanan dengan KTH sangat terbatas sehingga belum mampu mendukung pengelolaan HHBK. Kelompok kurang dapat mengakses informasi terbaru berkaitan komoditas HHBK yang dikelola KTH. Pemenuhan kebutuhan dukungan penyuluhan (materi, sarana, prasarana dan pembiayaan) dilakukan secara mandiri dan swadaya.

Kelembagaan penyuluhan juga belum mampu menyediakan atau memfasilitasi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kelompok. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan alokasi anggaran kegiatan penyuluhan. Kompetensi penyuluh kehutanan masih di bawah kemampuan anggota kelompok. Hal ini terjadi karena anggota kelompok memiliki pengalaman berusaha dalam pengelolaan komoditas tersebut. Keterbatasan kompetensi penyuluh kehutanan antara lain disebabkan oleh: 1) kemampuan penyuluh bersifat umum, tidak spesifik pada satu atau beberapa komoditas HHBK tertentu; 2) ketiadaan sarana, prasarana, dan pembiayaan pengembangan demplot-demplot sebagai tempat saling

belajar; 3) metode penyuluhan terbatas pada ceramah dan anjangan/anjangkarya ke kelompok.

Temuan ini sejalan dengan Soebiyanto (1998) yang menyimpulkan bahwa pemberdayaan petani ke arah kemandirian kurang ditunjang dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi sistem penyuluhan. Aspek-aspek yang terdapat dalam sistem penyuluhan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Perikanan) adalah: 1) kelembagaan penyuluhan, 2) kompetensi penyuluh, 3) metode penyuluhan, 4) materi penyuluhan, 5) sarana penyuluhan, 6) prasarana penyuluhan, dan 7) pembiayaan penyuluhan. Setiawan (2015) menunjukkan bahwa dukungan penyuluhan memberikan kontribusi yang positif sebagai faktor pendorong beragribisnis dalam perkembangan kemandirian pelaku muda beragribisnis. Sumarlan, Sumardjo, & Tjitropranoto (2012) menyimpulkan bahwa rendahnya dukungan penyuluhan menyebabkan rendahnya kinerja petani dalam penerapan sistem *agroforestry*.

Kuat-lemahnya dukungan unsur-unsur sistem penyuluhan akan memengaruhi kualitas pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK. Semakin kuat dukungan penyuluhan, baik dukungan kelembagaan, kompetensi penyuluh kehutanan, metode, materi, dan prasarana penyuluhan maka kualitas pemberdayaan kelompok dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu akan semakin meningkat.

Penelitian ini mendukung dukungan penyuluhan sebagai variabel penting yang sangat memengaruhi kualitas pemberdayaan sehingga perlu ditingkatkan. Hal ini sebagai pendorong terwujudnya kemandirian KTH dalam pengelolaan HHBK yang berdaya saring, berdaya saing, dan berdaya sanding.

Faktor berikutnya yang memengaruhi kualitas pemberdayaan kelompok dalam pengelolaan HHBK adalah dukungan faktor internal kelompok. Faktor tersebut tercermin dari: 1) cenderung tingginya

tingkat kedinamisan kelompok, 2) cenderung rendahnya tingkat keberfungsian kelompok, dan 3) cenderung rendahnya tingkat kemampuan kelompok.

Tingkat kedinamisan kelompok yang cenderung tinggi dapat dipahami dari cukup baiknya kemampuan kelompok dalam mengelola unsur-unsur dinamika. Semakin baik kelompok dalam mengelola unsur-unsur tersebut maka akan semakin dinamis kelompok tersebut. Cenderung rendahnya tingkat keberfungsian kelompok dicerminkan oleh belum optimalnya kelompok dalam menjalankan fungsi sebagai: 1) media pembelajaran kelompok, 2) media peningkatan kapasitas kelompok, 3) media pemecahan masalah, 4) media kerja sama kelompok, 5) media pengembangan usaha produktif, dan 6) media peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan/ lingkungan. Cenderung rendahnya tingkat kemampuan kelompok tercermin dari belum optimalnya kemampuan kelompok dalam mengelola kelembagaan, mengelola kawasan, dan mengelola usaha. Secara empirik, kelas kemampuan KTH termasuk dalam kelas pemula.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga aspek pada lingkungan internal KTH berpotensi memengaruhi kualitas pemberdayaan dalam pengelolaan komoditas HHBK. Kondisi ini dapat dipahami karena ketiga aspek tersebut merupakan cerminan dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kelompok dalam pengelolaan HHBK.

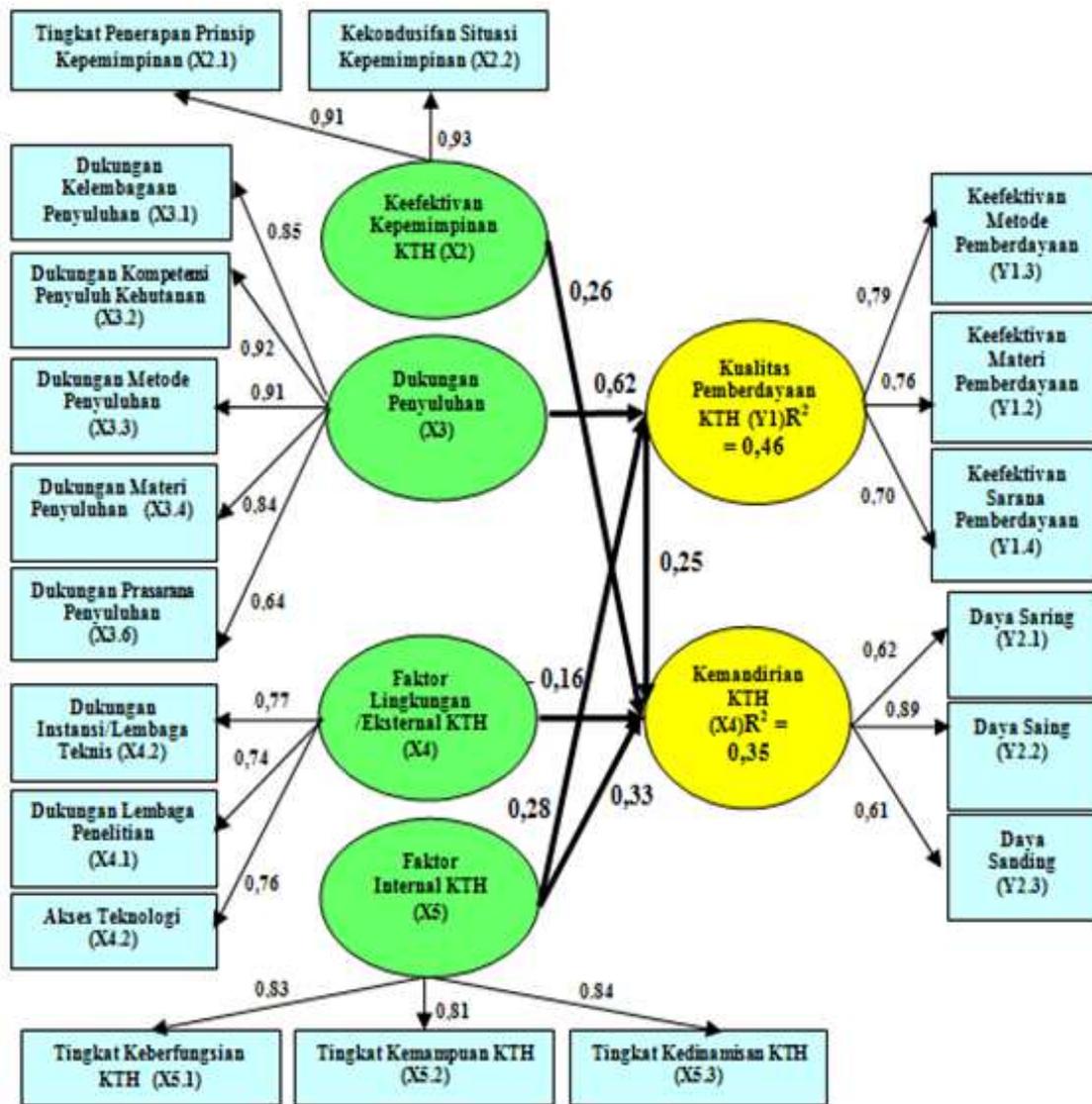
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi-rendahnya kualitas pemberdayaan sangat ditentukan oleh kuat-lemahnya dukungan penyuluhan dan kuat-lemahnya dukungan lingkungan internal. Semakin kuat dukungan penyuluhan dan dukungan lingkungan internal KTH maka kualitas pemberdayaan kelompok dalam pengelolaan HHBK akan semakin meningkat.

## **B. Model dan Strategi Peningkatan Kualitas Pemberdayaan KTH dalam Pengelolaan HHBK**

Model dan strategi peningkatan kualitas pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK dibangun dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhinya dari hasil analisis SEM (Gambar 1). Gambar 1 menunjukkan bahwa kualitas pemberdayaan KTH secara langsung dipengaruhi oleh dukungan penyuluhan dan faktor internal kelompok. Untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan KTH agar dapat meningkatkan kemandirian kelompok yang berdaya saring, berdaya saing, dan berdayaanding, dibutuhkan dua model yakni: 1) model peningkatan dukungan penyuluhan yang memberdayakan KTH, (2) model peningkatan dukungan faktor internal yang kondusif. Model-model tersebut difokuskan pada indikator-indikator yang dinilai kurang baik pada aspek-aspek yang memengaruhi kualitas pemberdayaan sehingga perlu ditingkatkan.

Indikator yang berpotensi merefleksikan pengaruh dukungan penyuluhan terhadap kemandirian kelompok dan perlu ditingkatkan adalah: 1) dukungan kompetensi penyuluh kehutanan PNS, 2) dukungan metode penyuluhan, 3) dukungan kelembagaan penyuluhan, 4) dukungan materi penyuluhan, dan 5) dukungan prasarana penyuluhan. Indikator yang berpotensi merefleksikan pengaruh faktor internal kelompok terhadap kemandirian kelompok dan perlu diperkuat adalah: 1) kedinamisan kelompok, 2) keberfungsian kelompok, dan 3) kemampuan kelompok.

Model peningkatan kualitas pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK dijabarkan ke dalam strategi yang saling berkaitan untuk mendorong terwujudnya kemandirian kelompok dari aspek daya saring, daya saing dan dayaanding. Strategi tersebut yaitu: 1) strategi



$Chi-Square = 399,54, df=123, P-value = 0,0000, RMSEA = 0,086$

Gambar 1 Model struktural peningkatan kualitas pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK  
 Figure 1 Structural model for improving the quality of forest farmer group empowerment in non timber forest product management.

peningkatan dukungan penyuluhan yang memberdayakan menuju daya saring, daya saing, dan daya sanding, dan 2) strategi penguatan faktor internal yang kondusif.

Strategi peningkatan kualitas pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK untuk peningkatan dukungan penyuluhan dilakukan melalui: 1) penguatan keberadaan kelembagaan penyuluhan sesuai amanat UU 16 Tahun 2006, 2) peningkatan

kompetensi penyuluh kehutanan PNS dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), 3) pengembangan metode penyuluhan yang memberdayakan, partisipatif, dan dialogis berbasis pemecahan masalah, 4) pengembangan materi penyuluhan yang efektif dan sesuai kebutuhan berbasis daya saring, daya saing, dan daya sanding, dan 5) fasilitasi prasarana penyuluhan yang efektif.

Penguatan keberadaan kelembagaan penyuluhan kehutanan dimaksudkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sistem penyuluhan, mensinergikan dukungan instansi/lembaga teknis pemberdayaan, akses teknologi, dan dukungan lembaga penelitian dengan cara menguatkan kolaborasi secara sinergis antar-pemangku kepentingan dalam pengelolaan HHBK melalui pembentukan kelompok kerja sehingga meningkatkan kemandirian kelompok dan kemudahan akses teknologi bagi kelompok dan anggotanya. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang memberdayakan mengarah pada daya saring, daya saing, dan daya sanding memerlukan dukungan politik sehingga alokasi anggaran kegiatan lebih memadai dan proposional. Peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan PNS dan PKSM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial serta kegiatan pengembangan kapasitas SDM lainnya seperti *workshop* dan studi banding ke daerah yang telah berhasil mengembangkan komoditas HHBK. Pengembangan metode penyuluhan yang memberdayakan, partisipatif, dan dialogis berbasis pemecahan masalah seperti sekolah lapang, magang, *workshop*, studi banding, temu karya, temu usaha sebagai proses pembelajaran yang memberikan peluang untuk pengalaman pada kehidupan nyata di lapangan. Pengembangan materi penyuluhan yang efektif dan sesuai kebutuhan mengarah pada daya saring, daya saing, dan daya sanding dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota kelompok dalam pengelolaan HHBK. Pengembangan prasarana penyuluhan yang efektif dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan melalui penerapan metode penyuluhan yang efektif dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan.

Strategi penguatan kondisi faktor internal kelompok melalui penguatan keberfungsian

kelompok dan kemampuan kelompok dengan cara: 1) pelatihan penguatan kelembagaan kelompok (fungsi dan administrasi), dan 2) pelatihan pengembangan usaha kelompok berbasis daya saring, daya saing, dan daya sanding.

Pelatihan penguatan kelembagaan kelompok bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KTH secara umum dan secara khusus dalam pengelolaan komoditas HHBK sehingga kelompok berfungsi sebagai media: 1) pembelajaran kelompok, 2) peningkatan kapasitas kelompok, 3) pemecahan masalah kelompok, 4) kerja sama kelompok, 5) pengembangan usaha produktif, dan 6) peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan/lingkungan. Penguatan administrasi kelompok bertujuan untuk mendukung peningkatan kelas kemampuan kelompok. Administrasi kelembagaan KTH yang baik juga dapat berfungsi bagi kelompok sebagai salah satu persyaratan untuk mengakses permodalan maupun kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan aktivitas kelompok. Kenyataan di lapangan, administrasi KTH cenderung sederhana dan apa adanya sehingga diperlukan penguatan terhadap hal-hal yang terkait dengan administrasi kelompok, seperti legalitas kelompok, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan rencana kerja kelompok.

Kemampuan kelompok (kelola kelembagaan, kelola usaha, dan kelola kawasan) meningkat dan kelompok menjadi semakin dinamis. Peningkatan kapasitas kelompok dilakukan melalui: 1) pelatihan formal maupun penerapan metode penyuluhan antara lain: temu karya, temu usaha, studi banding, karya wisata, dan sekolah lapang sehingga membuka peluang dan menjadi proses pembelajaran bagi anggota kelompok untuk meningkatkan kapasitasnya, 2) memfasilitasi materi, sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan penyuluhan yang memadai dan proposional sehingga membantu kelompok dan anggotanya mencari alternatif solusi

dalam mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi, 3) memfasilitasi penyuluh kehutanan PNS dalam mendampingi kelompok dan kegiatan kelompok melalui penyediaan materi, sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan penyuluhan yang memadai dan proposional sehingga tidak ada alasan bagi penyuluh kehutanan PNS untuk tidak melaksanakan tugas dan kegiatan pendampingan di wilayah kerjanya.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Kualitas pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK termasuk dalam kategori sedang dan cenderung rendah. Hal ini terindikasi dari faktor-faktor dominan yang memengaruhi yaitu: 1) dukungan penyuluhan yang tercermin dari: a) cenderung rendahnya kompetensi penyuluh kehutanan, b) lemahnya dukungan metode penyuluhan, c) cenderung lemahnya dukungan kelembagaan penyuluhan, d) rendahnya dukungan materi penyuluhan, dan e) rendahnya dukungan prasarana penyuluhan; 2) faktor internal kelompok yang tercermin dari: a) cenderung tingginya tingkat kedinamisan kelompok, b) cenderung rendahnya tingkat keberfungsian kelompok, dan c) cenderung rendahnya tingkat kemampuan kelompok. Strategi peningkatan kualitas pemberdayaan KTH dalam pengelolaan HHBK sebagai penjabaran dari model yang dibangun adalah: 1) strategi peningkatan dukungan penyuluhan yang memberdayakan menuju daya saring, daya saing, dan daya sanding; (2) strategi penguatan faktor internal yang kondusif dalam mendukung pengelolaan HHBK.

##### **B. Saran**

Dalam upaya peningkatan kualitas pemberdayaan terhadap KTH pengelola HHBK maka Pusat Penyuluh, Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan provinsi sebagai instansi penyelenggara penyuluhan maupun pemberdayaan KTH dapat mengoptimalkan dukungan penyuluhan melalui penerapan secara konsisten sistem penyelenggaraan penyuluhan dalam UU 16 Tahun 2006 yang sesuai dengan kebutuhan kelompok dan mengoptimalkan dukungan faktor internal kelompok melalui peningkatan kedinamisan, keberfungsian, dan kemampuan KTH dalam pengelolaan HHBK. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau Cabang Dinas Kehutanan (CDK) sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pengembangan pengelolaan komoditas HHBK sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh KTH, khususnya yang berada di luar kawasan hutan, dan didukung kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan kondisi saat ini serta berorientasi ke masa yang akan datang. Di dalam penyuluhan, hal tersebut mestinya menjadi substansi atau materi penyuluhan.

##### **UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)**

Terima kasih kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM yang telah memfasilitasi pembiayaan pendidikan dan penelitian. Terima kasih pula diucapkan kepada KTH dan rekan-rekan penyuluh kehutanan di Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi DI Yogyakarta yang telah membantu dalam memberikan informasi dan pembelajarannya yang sangat berharga dalam penyelesaian studi.

##### **DAFTAR PUSTAKA**

Hardjanto, Kusmana, C., Suhendang, E., Syafii, W., Muntasib, E. K. S. H., & Darusman, D. (2013). Peran pembangunan kehutanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. In Pembangunan Perdesaan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Bogor (ID): IPB Press.

- Latan, H. (2013). *Structural equation modeling. Konsep dan aplikasi menggunakan program LISREAL 8.80*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Prawiranegara, D., Sumardjo, Sri, D. P. L., & Harijati, S. (2015). Strengthening role of farmer institution in enhance of innovation capability based on ICT in West Java Province, Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science*, 5(12), 128–136.
- Puspitojati, T. (2011). Persoalan definisi hutan dan hasil hutan dalam hubungannya dengan pengembangan HHBK melalui hutan tanaman. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 8(3), 210–227. <https://doi.org/10.20886/jakk.2011.8.3.210-227>.
- Raya, A. B. (2014). A comparison of the function of leader-member exchange in two neighboring farmer groups in a sandy land area in Yogyakarta Province, Indonesia. *Asian Social Science*, 10(12), 21–34. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n12p21>.
- Ristinasari, Muljono, P., & Gani, D. S. (2013). Dampak program pemberdayaan model desa konservasi terhadap kemandirian masyarakat: kasus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(3), 173–185. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2013.10.3.173-185>.
- Salaka, F. J., Nugroho, B., & Nurrochmat, D. R. (2012). Strategi kebijakan pemasaran hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(1), 50–65.
- Setiawan, I. (2015). *Perkembangan kemandirian pelaku brain gain sebagai alternatif inovasi regenerasi pelaku agribisnis di dataran tinggi Jawa Barat* (Disertasi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sidu, D. (2010). Model pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Hutan Lindung Jompi, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. *Ecotrophic: Journal of Environmental Science*, 5(2), 79–84.
- Soebiyanto, F. X. (1998). *Peranan kelompok dalam mengembangkan kemandirian petani dan ketangguhan berusahatani* (Disertasi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sumarlan, Sumardjo, & Tjitropranoto, D. S. G. P. (2012). Peningkatan kinerja petani sekitar hutan dalam penerapan sistem *agroforestry* di pegunungan Kendeng, Pati, Jawa Tengah. *Agro Ekonomi*, 30(1), 25–39.
- Sumardjo. (2017, Mei). *Alternatif penyelenggaraan penyuluhan pasca UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Penyuluhan dan Komunikasi Nasional "Peran Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan dalam Penguatan Kemandirian Masyarakat", Padang: UNAND.
- Suprayitno A. R., Sumardjo, Gani, D. S., & Sugihen, B. G. (2011). Model peningkatan partisipasi petani sekitar hutan dalam pengelolaan hutan kemiri rakyat: kasus pengelolaan hutan kemiri kawasan pegunungan Bulusaraung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3), 176–195.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Perikanan.
- Utama, S. (2010). *Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pendekatan kelompok (kasus Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat pada areal hutan produksi Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah* (Disertasi). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Yumi, S., Gani, D. S., & Sugihen, B. G. (2011). Model pengembangan pembelajaran petani dalam pengelolaan hutan rakyat lestari: kasus di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3), 196–210.
- Zulvera, Sumardjo, & Slamet M., G. B. (2014). Faktor-faktor yang berhubungan dengan keberdayaan petani sayuran organik di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. *Mimbar*, 30(2).